



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUSPRIYANTI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **167253**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/102 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 210 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m²/85 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 3584 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
5. Tanah Seluas 3233 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
6. Tanah Seluas 1916 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 190 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
8. Tanah Seluas 190 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
9. Tanah Seluas 6497 m² di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 750.000.000
10. Tanah Seluas 1059 m² di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 563 m² di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 75.000.000
12. Tanah Seluas 1879 m² di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH DENGAN



AKTA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

15.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA GENIO C1M02N42L0 A/T Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

240.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

78.709.612

F. HARTA LAINNYA

Rp.

100.000.000

Sub Total

Rp.

4.783.709.612

III. HUTANG

Rp.

438.376.116

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.345.333.496

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.